

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan daerah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan mendukung pembangunan yang merata. Jika dilihat dari hal pengelolaan anggaran daerah, DPRD berperan krusial dalam proses alokasi, distribusi, serta menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah (Rahmah & Marliyah, 2021).

Peran strategis dalam membangun dan mempertahankan citra pemerintah di mata masyarakat, dipengaruhi oleh bagaimana informasi dikelola dan dapat disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). JDIH DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki peran krusial dalam memastikan keterbukaan informasi hukum, meningkatkan transparansi pemerintahan daerah, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap dokumen hukum yang berlaku. Keberadaan JDIH sangat penting dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan hukum dan peran DPRD Provinsi Jawa Tengah.

JDIH adalah sistem yang dikembangkan untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum secara terpadu, sistematis, dan dapat diakses publik. DJDIH berperan sebagai wadah resmi penyebarluasan produk hukum yang dihasilkan atau dibahas oleh DPRD di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Fungsi legislasi DPRD, yakni kewenangan dalam membentuk peraturan daerah bersama gubernur memiliki keterkaitan dengan keberadaan JDIH. Melalui JDIH, seluruh produk hukum daerah yang dihasilkan DPRD dapat didokumentasikan dan diakses secara luas oleh masyarakat, sehingga mendukung transparansi proses legislasi. Demikian pula dalam fungsi

anggaran, berbagai regulasi yang berkaitan dengan keuangan daerah seperti Perda APBD dapat diakses oleh publik melalui JDIH yang dapat membantu masyarakat dalam memahami arah kebijakan fiskal daerah.

Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan kebijakan pemerintah daerah, DPRD membutuhkan dukungan dokumentasi hukum yang kuat dan mudah diakses. JDIH menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan basis data hukum yang komperhensif, sehingga masyarakat juga dapat terlibat secara aktif dalam proses pengawasan terhadap implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, keberadaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memperkuat pelaksanaan ketiga fungsi utama DPRD yakni, legislasi, anggaran, dan pengawasan yang sekaligus menjadi sarana efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dan membangun parlemen yang lebih transparan, inklusif dan akuntabel.

JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki media publikasi sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah, yakni Instagram resmi JDIH @jdihsetdprdjateng, TikTok @jdih.set.dprd.pro, YouTube @jdihdprdjateng, dan website resmi yaitu <https://jdih.dprd.jatengprov.go.id/>. *Engagement Rate* (ER) dikatakan ideal apabila memenuhi standar yang umum digunakan dalam industri media sosial dan digital marketing. Berikut adalah acuan yang digunakan untuk menilai apakah ER sudah ideal atau belum yang bersumber dari slice.id:

1. Instagram:
 - $\geq 3\%$ = Sangat Baik (Ideal)
 - $1\% - 3\%$ = Cukup baik
 - $\leq 1\%$ = Rendah (Perlu peningkatan)
2. Tiktok:
 - $\geq 5\%$ = Sangat baik (Ideal)
 - $3\% - 5\%$ = Cukup baik

- $\leq 3\%$ = Rendah
3. YouTube:
- $\geq 5\%$ = Ideal & Sangat baik
 - $2\% - 5\%$ = Baik
 - $\leq 2\%$ = Kurang baik
4. Website:
- *Bounce Rate* $< 50\%$ = Baik
 - *Bounce Rate* $> 70\%$ = Perlu perbaikan

Adapun analisis data *Engagement Rate* (ER) Instagram dan Tiktok JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan followers Instagram sebanyak 537 dan TikTok sebanyak 172 yang diambil pada tanggal 10 Maret 2025 menghasilkan tiga judul konten yang sama pada platform Instagram dan Tiktok sebagai berikut:

Tabel 1.1 Analisis ER Instagram dan TikTok

No.	Platform	Tanggal Publikasi	Judul	Engagement Rate IG & TikTok ganti keterangan	Keterangan
1.	Instagram	07 Maret 2025	Kabag Dukung Penuh Pemenuhan Indikator	3,2%	Cukup baik
	TikTok	06 Maret 2025	Monev di JDIH DPRD Temanggung	2,8%	Rendah
2.	Instagram	05 Maret 2025	JDIH DPRD Purbalingga: Website	3,9%	Cukup baik
	Tiktok	07 Maret 2025	dan media Sosial Jadi wadah Sosialisasi Produk Hukum	4%	Cukup Baik
3.	Instagram	06 Maret 2025	JDIH DPRD Banjarnegara Tunjukan	3%	Rendah

	TikTok	05 Maret 2025	Tekad Majukan Informasi Hukum	2,8%	Rendah
--	--------	---------------	-------------------------------	------	--------

Dilihat dari analisis Engagement Rate (ER) di atas berdasarkan akun media sosial Instagram dan TikTok JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan konten media publikasi yang sama dan jenis platform yang berbeda, yakni Instagram dan TikTok menjelaskan bahwa Instagram JDIH memiliki tingkat *engagement* yang lebih besar dibandingkan akun TikTok.

Tabel 1.2 Analisis ER YouTube

No.	Tanggal Publikasi	Judul	Views	Like	Komentar	Engagement Rate YouTube	Keterangan
1.	19 November 2024	Jingle JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	47	3	-	54,5%	Ideal & Sangat baik
2.	26 September 2024	Cari referensi Untuk Skripsi yang Lengkap & Nyaman? Perpustakaan Sekretariat DPRD Jateng Solusinya!	31	8	-	51%	Ideal & Sangat baik
3.	24 September 2024	Selamat hari Kunjung Perpustakaan !	16	6	-	31%	Ideal & Sangat baik

Data analisis ER YouTube JDIH memiliki presentasi nilai yang besar namun dilihat dari *views* dan interaksi yang ada pada setiap konten video yang dipublikasikan oleh JDIH masih tergolong rendah dengan analisis 3 konten video YouTube dan dengan *views* terbanyak sebanyak 47 *views* dan frekuensi publikasi konten YouTube JDIH terakhir dipublikasikan pada bulan November 2024 dan belum ada konten baru pada tahun 2025.

Tabel 1.3 Analisis ER Website

No.	Total Pengunjung	Total Interaksi	Engagement Rate Website	Keterangan
1.	2.187	4	0.2%	Perlu perbaikan

Terakhir merupakan analisis ER *website* JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah selama bulan Februari masih tergolong rendah yakni 0,2% dan masih dibawah dari rata-rata *engagement* yang seharusnya. Oleh karena itu, berdasarkan analisis ER dari empat media publikasi yang digunakan JDIH Sekretariat DPRD Jawa Tengah dapat dapat disimpulkan bahwa akun Instagram JDIH memiliki nilai paling besar dibandingkan dengan TikTok, YouTube, dan Website yang di analisis menggunakan *engagement rate*.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas strategi komunikasi yang telah diterapkan, berikut ini adalah data analisis konten publikasi interaktif berdasarkan jangkauan oleh akun Instagram @jdihsetdprdjateng dengan followers terakhir sebanyak 537, data analisis dan ER diambil selama publikasi 2 minggu terakhir terhitung sejak 13 Februari – 26 Februari 2025.

Tabel 1.4 Analisis ER Instagram Publikasi JDIH selama 2 Minggu Terakhir

No.	Tanggal Publikasi	Cover Konten	Judul	Engagement Rate Instagram	Keterangan
1.	17 Februari 2025		Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	1,3%	Rendah (Perlu peningkatan)
2.	17 Februari 2025		JDIH Purworejo Tunjukan Komitmen Melalui Kegiatan Monev Tahun 2025	4,4%	Sangat baik (Ideal)
3.	18 februari 2025		Capai Kemajuan Signifikan Kolaborasi Tingkatkan Kualitas JDIH Kabupaten Kebumen	2,02%	Cukup baik

No.	Tanggal Publikasi	Cover Konten	Judul	Engagement Rate Instagram	Keterangan
4.	19 Februari 2025		JDIH Kabupaten Pati Fasilitas Perpustakaan Ditinggalkan	1,8%	Cukup baik
5.	20 Februari 2025		Sekretaris DPRD Rembang Dukung Penuh Pengembangan JDIH Pada Monev Tahun 2025	1,7%	Cukup baik
6.	20 Februari 2025		JDIH Seretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Mengucapkan: Selamat Bertugas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Periode 2025-2030	2,02%	Cukup baik

No.	Tanggal Publikasi	Cover Konten	Judul	Engagement Rate Instagram	Keterangan
7.	23 Februari 2025		Berbagi berkah & Kebahagiaan Bersama MINJDIH!	2,6%	Cukup baik
8.	23 Februari 2025		Pidato Sambutan Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 dalam Rapat Paripurna	1,9%	Cukup baik
9.	24 Februari 2025		Monev JDIH DPRD Cilacap Perlu Peningkatan pada Website dan Koleksi Dokumen	3,1%	Sangat baik (Ideal)

No.	Tanggal Publikasi	Cover Konten	Judul	Engagement Rate Instagram	Keterangan
10.	25 Februari 2025		JDIH DPRD Banyumas Aktif, Monev Soroti Peningkatan Ruang dan Sosialisasi	1,9%	Cukup baik
11.	26 Februari 2025		Sekwan Grobogan Dukung Penuh Pengembangan JDIH, Ruang Perpustakaan Jadi Prioritas	2,6%	Sangat baik (Ideal)

Berdasarkan analisis data konten publikasi di akun Instagram @jdihsetdprdjateng selama periode 13 Februari – 26 Februari 2025, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penyebaran mengenai kebijakan dan peraturan daerah melalui media sosial masih memiliki permasalahan dan beberapa tantangan. Meskipun Instagram menjadi salah satu platform komunikasi digital yang memiliki potensi jangkauan luas, daya tarik publik terhadap yang dipublikasikan oleh konten-konten Instagram JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti format penyampaian informasi yang masi formal dan berbasis teks, minimnya penggunaan konten visual interaktif seperti

infografis dan video animasi, serta kurangnya inovasi dalam strategi komunikasi digital yang dapat menarik perhatian.

Dapat disimpulkan bahwa Instagram JDIH memiliki efektivitas dan peluang yang lebih besar dibandingkan media resmi lainnya yang dimiliki oleh JDIH sebagai media publikasi untuk meningkatkan *engagement rate* pada media sosial bagi gen z dalam memahami pengenalan peran DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga legislatif dengan kebijakan, peraturan daerah, produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.1 Akun Instagram JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Publikasi komunikasi interaktif yang digunakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah menggunakan akun Instagram @jdihsetdprdjateng yang memiliki 537 pengikut dengan 462 postingan yang dipublikasikan. Akun Instagram JDIH memiliki potensial yang cukup besar dan mampu untuk menarik interaksi akses pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai peran, fungsi dan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah khususnya DPRD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga legislatif daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pertama penulis yang dilaksanakan pada hari senin, 3 Februari 2025 bersama dengan Pegawai JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Afinada Aulia Agani, S.I.Kom., M.I.Kom bagian publikasi kebijakan dan produk hukum pemerintah daerah yang juga mengelola strategi publikasi media komunikasi DPRD Provinsi Jawa Tengah menghasilkan tantangan seperti minimnya tenaga ahli dalam bidang komunikasi digital dan manajemen informasi menyebabkan strategi komunikasi yang diterapkan kurang inovatif. Kurangnya inovasi dan improvisasi dalam menyebarluaskan informasi melalui komunikasi yang masih berbasis formal dan dalam bentuk teks masih menjadi masalah dan belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat terutama generasi muda. Beliau menuturkan bahwa “di DPRD khususnya JDIH yang mengelola publikasi yang ada di DPRD masih mengalami kesulitan dan masalah salah satunya kurangnya kreativitas dan ide bahkan tenaga untuk mengelola publikasi yang bisa menjawab keterbutuhan masyarakat dikarenakan juga padatnya kegiatan kami yang harus memonitoring dan mengevaluasi JDIH dan DPRD yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah”.

JDIH menargetkan audiens utama dari kelompok usia 15-25 tahun dengan salah satu hal yang dipertimbangkan termasuk dari kelompok usia tersebut yaitu yang mengunjungi langsung untuk kegiatan edukasi parlemen lembaga legislatif dan yang paling intens menggunakan media sosial JDIH.

Sebagai acuan masalah yang penulis teliti pada bagian latar belakang yang ingin dibahas terdapat rekapitulasi kunjungan sekolah maupun perguruan tinggi yang berkunjung dalam kegiatan program “Parlemen Goes to Modern” dan kunjungan mahasiswa penelitian serta magang selama 6 bulan terakhir terhitung sejak September 2024 – Februari 2025, data berikut didapatkan berdasarkan pengambilan data penulis secara langsung melalui JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.5 Jumlah Instansi yang Kunjungan *Parlemen Goes to Modern*

No.	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Jumlah Kunjungan	Kategori Kunjungan
1.	Universitas Wahid Hasyim	1 kali	<i>Parlemen Goes to Modern</i>
2.	SMAN 1 Semarang	1 kali	<i>Parlemen Goes to Modern</i>
3.	SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang	1 kali	<i>Parlemen Goes to Modern</i>
4.	UNTAG Semarang	1 kali	<i>Parlemen Goes to Modern</i>
5.	Universitas Islam Sultan Agung	2 kali	<i>Parlemen Goes to Modern</i>

Tabel 1.6 Jumlah Kunjungan Penelitian & Magang

No	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Jumlah Kunjungan	Kategori Kunjungan
1.	Universitas Diponegoro	15 kali	Penelitian & Magang
2.	Universitas Negeri Semarang	10 kali	Penelitian & Magang
3.	Universitas Tidar Magelang	10 kali	Penelitian & Magang
4.	Universitas Islam Sultan Agung	5 kali	Penelitian & Magang
5.	Universitas Semarang	6 kali	Penelitian & Magang
6.	Universitas Islam Negeri Walisongo	5 kali	Penelitian & Magang

Bahwa dari total banyaknya tabel tersebut menunjukkan tingkat kunjungan terbanyak diraih perguruan tinggi yakni sebanyak 15 kali oleh Universitas Diponegoro, dan kunjungan paling sedikit oleh sekolah, sebanyak 1 kali dalam kegiatan *Parlemen Goes to Modern*. Data tersebut menunjukkan bahwa instansi sekolah memiliki ketertarikan tinggi mengenai edukasi politik, yakni bagaimana peran, tugas, fungsi dan kinerja yang ada di pemerintah daerah khususnya DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Adapun faktor lainnya mengenai masalah terkait penyebab rendahnya pemahaman masyarakat dan generasi muda dalam memahami peran, tugas, dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Diantaranya:

1. Rendahnya kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah khususnya DPRD yakni dibuktikan dengan data berupa berita yang ada di masyarakat yang salah satu beritanya berjudul “Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Ribuan Mahasiswa di Semarang Jebol gerbang DPRD Jateng” yang diterbitkan oleh Kompas pada tanggal 22 Agustus 2024. Dalam berita tersebut membahas mengenai bagaimana kekecewaan masyarakat yang disuarakan oleh mahasiswa mengenai kebijakan pemerintah yang terbukti otoriter dan hanya membuka peluang yang besar bagi dinasti politik;
2. Penyampaian informasi yang kurang menarik dan inovatif, seperti minimnya pemanfaatan konten visual dan interaktif pada media Instagram dan TikTok yang dimiliki oleh JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

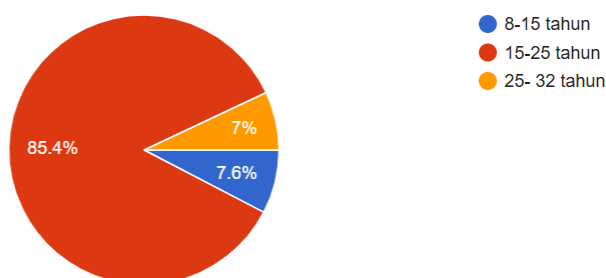
Berdasarkan data primer mengenai keterbutuhan edukasi politik pada target audiens yakni siswa dan mahasiswa yang melakukan kunjungan ke JDIH penulis memperoleh bahwa responden merasa kurang mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai peran dan fungsi legislatif daerah. Data ini diambil berdasarkan hasil wawancara langsung penulis dengan responden yang mengunjungi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diterima dan disambut oleh JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah di bulan Februari dan

Maret. Salah satu mahasiswa UIN Walisongo mengungkapkan bahwa “saya merasa edukasi politik yang lebih interaktif, komunikatif, kreatif dan berbasis diskusi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran kami sebagai penerus negeri dalam berpartisipasi mengenai proses dalam berdemokrasi” ujar Muhammad Rizki Adnan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Sementara itu, siswa SMAN 1 Semarang menyatakan bahwa “masih minimnya informasi mengenai bagaimana kebijakan daerah dibuat dan harapan saya dan teman-teman sebagai siswa sekolah, bisa dengan mudah mendapatkan sumber informasi yang lebih banyak mengenai edukasi yang lebih interaktif dan melibatkan pelajar dalam memahami proses legislasi yang ada” ujar Ni Putu Kirana Shinta Devi.

Selain data hasil pra survei di atas penulis juga menganalisis masalah dan keterbutuhan yang dialami target audiens yang diambil melalui *google form* dengan responden siswa SMA/SMK, Mahasiswa, dan Masyarakat Umum dengan target utama siswa dan mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, adapun hasil yang diperoleh mengenai masalah dan keterbutuhan yang dialami oleh target audiens melalui pra survei sebagai berikut:

Usia

157 responses



Gambar 1.2 Diagram Pra Survei Usia Responden

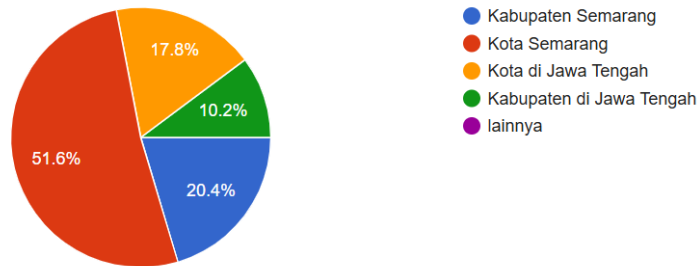
Berdasarkan hasil diatas yang mengisi survei mengenai pemahaman masyarakat mengenai peran DPRD Provinsi Jawa Tengah menghasilkan mayoritas responden berasal dari kelompok usia 15-25 tahun dengan

persentase 85,4%. Sementara itu, usia 8-15 tahun hanya 7,6% dan kelompok 25-32 tahun sebanyak 7%.

Domisili

157 responses

 Copy chart



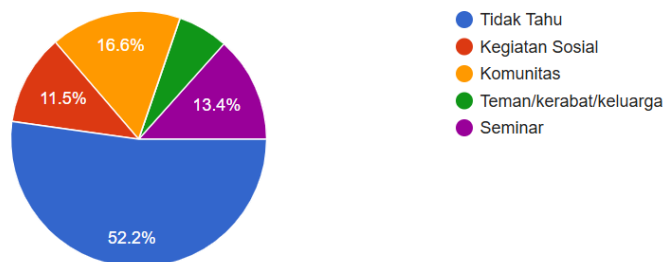
Gambar 1.3 Diagram Pra Survei Domisili Responden

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berasal dari Kota Semarang, dengan persentase 51,6%, diikuti oleh Kabupaten Semarang sebesar 20,4%. Sementara itu, 17,8% berasal dari kota lain selain Semarang yang ada di Jawa Tengah.

Apakah Anda mengetahui JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah?

157 responses

 Copy chart



Gambar 1.4 Diagram Pra Survei apakah mengetahui JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

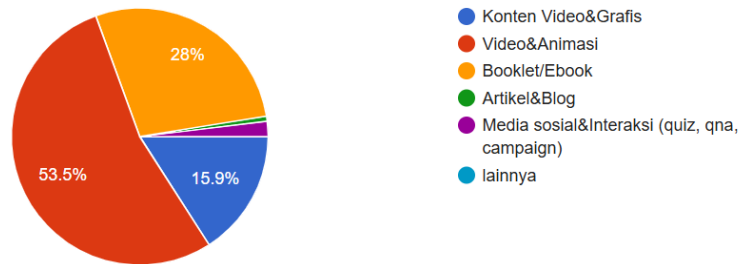
Berdasarkan hasil survey diatas mengenai pemahaman masyarakat mengenai peran DPRD Provinsi Jawa Tengah, dari 157 responden yang mengetahui JDIH Sekretariat DPRD sebesar 47,9% yang diketahui oleh beberapa faktor yakni kegiatan sosial, komunitas, teman/kerabat/keluarga, dan seminar. Dengan mayoritas mengetahui JDIH dari komunitas dan

seminar. Namun, sebanyak 52,2% masih banyak yang belum mengetahui JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Format konten apa yang Anda butuhkan dalam memahami Peran dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah?

 [Copy chart](#)

157 responses

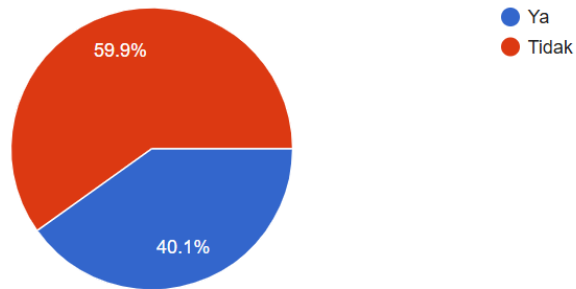


Gambar 1.5 Diagram Pra Survei Format Konten yang di butuhkan Responden

Berdasarkan hasil survei di atas, mayoritas responden sejumlah 53,5% memilih **video dan animasi** sebagai format terbaik untuk memahami peran dan fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, **booklet atau ebook** menjadi pilihan kedua dengan persentase 28%. Ini menandakan bahwa masih ada kebutuhan akan bahan bacaan yang dibutuhkan. Sementara itu, **konten video dan grafis** yang paling sedikit diminati dalam jumlah persentase yakni dengan persentase 15,9%.

Apakah Anda mengetahui Mengenai Program "School Goes To Parlemen" yang diadakan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah?

157 responses



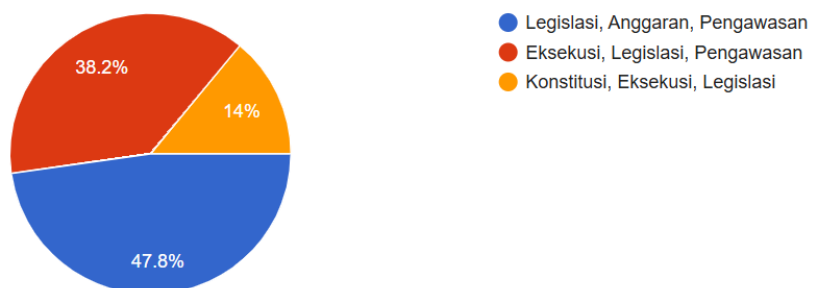
Gambar 1.6 Diagram Pra Survei Pengetahuan Responden Mengenai Program School Goes to Parlemen

Hasil di atas menunjukkan bahwa masih ada 40.1% dari 157 responden masih belum mengetahui program DPRD Provinsi Jawa Tengah yakni, school goes to parlemen atau parlemen goes to modern yang merupakan program yang sama. Data ini menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan upaya sosialisasi program DPRD Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan kebutuhan yakni konten visual.

Apakah Anda memahami peran dan fungsi DPRD? Menurut Anda manakah yang termasuk dengan fungsi DPRD dibawah ini?

Copy chart

157 responses



Gambar 1.7 Diagram Pra Survei mengenai pemahaman peran dan fungsi DPRD

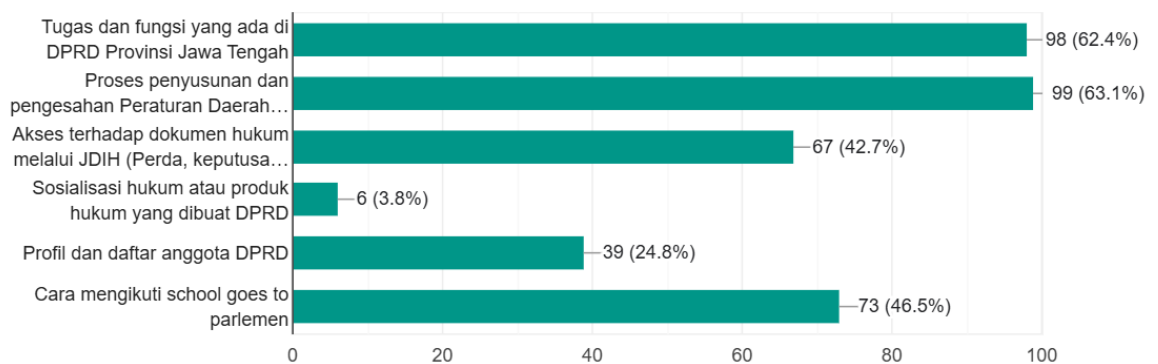
Berdasarkan hasil pra survei diatas mengeni pemahaman peran dan fungsi DPRD, menunjukan sebanyak 47,8% memilih opsi a yakni, legislasi,

anggaran, pengawasan, 38,2% memilih opsi b yakni, eksekusi, legislasi, pengawasan, dan sebanyak 14% memilih opsi c yakni, konstitusi, eksekusi, legislasi. Dengan jawaban yang benar adalah opsi a yakni, legislasi, anggaran, pengawasan yang merupakan fungsi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Apa yang ingin Anda ketahui dari DPRD dan JDIH Provinsi Jawa Tengah?

 Copy chart

157 responses



Gambar 1.8 Diagram Pra Survei mengenai apa saja yang ingin diketahui oleh Responden mengenai DPRD dan JDIH Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa mayoritas memilih tugas dan fungsi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan proses penyusunan dan pengesahan peraturan daerah (Perda) dengan selisih 1 responden. Disusul dengan memilih cara mengikuti school goes to parlemen atau parlemen goes to modern yang merupakan program yang sama dengan Akses terhadap dokumen hukum melalui JDIH (Perda, keputusan, dan informasi hukum) dengan selisih 6 responden.

Generasi Z, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan kelompok generasi yang sejak lahir telah terbiasa berinteraksi dengan teknologi, sehingga perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola hidup dan karakteristik mereka (Aini et al., 2024). Sejalan dengan karakteristik tersebut, berdasarkan hasil analisis tanggapan minat generasi z terhadap konten narasi visual dalam animasi 2D menunjukkan bahwa media ini efektif dalam meningkatkan rasa ingin tahu

serta keterlibatan mereka dalam pembelajaran mengenai budaya dan sejarah (Wardani et al., 2023).

Public Relations (PR) atau Hubungan Masyarakat (Humas) adalah bidang atau fungsi manajemen strategis yang membangun dan memelihara hubungan positif antara organisasi dan publiknya melalui komunikasi yang terencana, terbuka, dan berkesinambungan satu sama lain. Seorang praktisi PR berperan sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dan masyarakat, guna menciptakan kepercayaan dan citra yang positif. Oleh karena itu, seorang praktisi PR juga bertugas untuk menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk dapat menyampaikan pesan organisasi kepada publik.

Sebagai wujud dari lembaga pemerintahan praktisi PR memiliki peran penting yakni sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Sejalan dengan lingkungan pemerintahan, PR bertanggung jawab dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan kebijakan, program, serta pencapaian yang dilakukan pemerintah kepada publik. Pemerintahan yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik membutuhkan komunikasi yang efektif agar masyarakat atau publik dapat memahami kebijakan yang dirancang dan diterapkan. PR dalam lembaga pemerintahan berfungsi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media massa, media sosial, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas.

Seiring dengan meningkatnya permintaan transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan, praktik PR di lingkungan pemerintahan berkembang menjadi bentuk yang lebih dikenal *Government Public Relations* (GPR), yang menekankan pada komunikasi dua arah yang terencana antara pemerintah dan publik. *Government Public Relations* (GPR) atau hubungan masyarakat pemerintah merupakan praktik PR yang berfokus pada komunikasi strategis antara pemerintah dan

masyarakat. GPR bertujuan menyebarkan informasi yang akurat dan transparan mengenai kebijakan, peraturan, serta program pemerintah kepada publik. Perintah dalam hubungan masyarakat pemerintah biasa dilakukan dalam kepentingan dan tujuan demokratis yakni pelaporan dan responsivitas pesan komunikasi yang disampaikan melalui media kepada masyarakat (Widiastuti, 2021). GPR memiliki peran krusial dalam membangun hubungan antara DPRD Provinsi Jawa Tengah dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman publik mengenai tugas dan fungsi DPRD.

Salah satu peran utama *Government Public Relations* (GPR) di lingkungan DPRD adalah menyusun dan mengelola berbagai bentuk media komunikasi yang bersifat informatif dan interaktif. Ini mencakup pengelolaan akun media sosial seperti Instagram, *website* resmi, dan berbagai platform digital lainnya yang menjadi sarana penyampaian informasi kepada publik. GPR hadir sebagai jembatan antara lembaga legislatif dan masyarakat, dengan tujuan membangun citra lembaga yang transparan, terbuka, dan dipercaya publik. Dalam perannya, GPR tidak hanya menyampaikan informasi yang searah, tetapi juga membuka ruang dialog dengan masyarakat, agar informasi mengenai program kerja, kebijakan, hingga produk hukum DPRD dapat dipahami dan direspons secara aktif oleh publik.

Oleh karena itu, dalam menghadapi dinamika kebutuhan informasi publik dan tantangan komunikasi yang kompleks, praktisi PR, khususnya dalam ranah *Government Public Relations* (GPR), dituntut untuk merancang solusi komunikasi yang strategis, adaptif, dan berbasis data guna menjawab permasalahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, transparan, dan relevan. Salah satu bentuk solusi tersebut diwujudkan melalui produksi konten video animasi edukasi yang dirancang berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dengan target audiens generasi Z dan pengguna media sosial, khususnya Instagram, yang akan mengakses informasi melalui akun resmi JDIH.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan bahwa meskipun DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui akun Instagram @jddihsetdprdjateng telah mempublikasikan berbagai konten informatif terkait peran, fungsi kelembagaan, serta layanan JDIH, namun performa akun tersebut masih menunjukkan tingkat *engagement rate* (ER) yang belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya interaksi audiens serta pertumbuhan pengikut yang cenderung stagnan. Salah satu faktor penyebabnya adalah pendekatan konten yang belum sepenuhnya sesuai dengan preferensi dan karakteristik generasi Z sebagai target utama.

Minimnya daya tarik visual serta kurangnya elemen interaktif dalam penyampaian informasi menjadi tantangan dalam membangun koneksi dengan audiens muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inovatif, khususnya melalui media video animasi edukatif yang dirancang untuk menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi digital generasi Z. Dengan optimalisasi media visual ini, diharapkan penyampaian informasi mengenai kelembagaan DPRD dan layanan hukum melalui Instagram dapat menjadi lebih efektif, sekaligus mendorong peningkatan *engagement rate* secara signifikan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk mengoptimalkan *engagement rate* (ER) akun Instagram @jddihsetdprdjateng melalui produksi video animasi edukatif sebagai media literasi politik yang informatif dan menarik bagi generasi Z. Melalui konten visual ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap kelembagaan DPRD Provinsi Jawa Tengah serta memperluas akses terhadap informasi hukum yang disediakan oleh JDIH secara efektif dan interaktif.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari karya ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Memberikan pengalaman praktik langsung dalam merancang, memproduksi video animasi edukasi untuk meningkatkan pemahaman, dan pengenalan peran DPRD Provinsi Jawa Tengah serta melakukan evaluasi efektivitas mengenai video animasi sebagai media komunikasi publik di masyarakat;
- b. Mengembangkan keterampilan dalam penelitian, analisis media, serta strategi komunikasi digital; dan
- c. Menambah wawasan tentang strategi komunikasi pemerintahan dan bagaimana media digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi serta partisipasi publik.

2. Bagi Akademik

- a. Menjadi referensi tambahan dalam kajian komunikasi publik, khususnya yang berkaitan dengan literasi politik dan pemanfaatan media digital interaktif;
- b. Memberikan contoh konkret penerapan metode komunikasi visual dan edukasi berbasis animasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran di bidang komunikasi, media, atau hubungan masyarakat;
- c. Memperkaya hasil riset terapan mengenai efektivitas media sosial dan animasi edukatif dalam menjangkau generasi Z sebagai target audiens strategis dalam pendidikan politik.

3. Bagi Pemerintah

- a. Menyediakan media komunikasi yang inovatif, kreatif dan lebih menarik dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan publik dan peran DPRD kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPRD dengan menyediakan media yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama generasi muda; dan

- c. Mendukung strategi digitalisasi dalam komunikasi pemerintahan guna menjangkau lebih banyak audiens melalui platform media sosial.

4. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan informasi yang lebih mudah dipahami mengenai peran dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan daerah;
- b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif pemerintah daerah; dan
- c. Tersedianya media edukasi yang menarik dan interaktif sehingga lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman politik dan pemerintahan.

1.5 Luaran

Luaran dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah video edukasi yang berjumlah tiga video yang dipublikasikan pada platform Instagram @jdihsetdprdjateng dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, dan pengenalan peran DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sebagai sarana edukasi parlemen siswa/mahasiswa selain itu juga video dengan judul “Edukasi Politik melalui Pemanfaatan Konten Media Sosial” yang dipublikasikan di YouTube pribadi penulis yang telah terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI).